

# **EFEKTIVITAS PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PDPM), STUDI TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KELURAHAN MAMBORO KECAMATAN PALU UTARA KOTA PALU**

**Jans Wilianto Nasila**

Dosen Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tadulako

## **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas program daerah pemberdayaan masyarakat (PDPM) dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara Kota Palu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) di Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, belum berhasil (efektif) memandirikan masyarakat. Usaha bersama yang digerakkan melalui Kelompok Masyarakat Swadaya (KMS) belum mampu membangkitkan motivasi, menciptakan dan meningkatkan hubungan kerja, meningkatkan modal usaha, mendayagunakan potensi sosial ekonomi lokal, dan memperkuat budaya kewirausahaan, serta mengembangkan akses pasar. Bantuan modal yang diberikan tidak mampu menggerakkan, meningkatkan dan memajukan usaha yang digelutinya, walaupun telah berjalan cukup lama. Berbagai usaha masyarakat dalam bentuk usaha kecil berupa pembuatan kue kering dan basah, serta usaha perbengkelan, kurang memberi prospek bagi peningkatan pendapatan.*

**Key words::** Efektivitas, PDPM, Penanggulangan Kemiskinan

## PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan nasional tidak lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan secara menyeluruh. Paradigma pembangunan nasional adalah pembangunan yang berpusat pada manusia yaitu, sebagai sasaran atau dan subyek pembangunan. Menempatkan manusia sebagai obyek dan subyek, yang memungkinkan dirinya dapat mengaktualisasikan dirinya untuk memperbaiki kehidupannya. Salah satu sarana yang memungkinkan dirinya mudah mengakses berbagai program-program pembangunan yaitu, melalui kebijakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat yang kurang mampu (miskin).

Kebijakan pemerintah yang berpihak kepada warga yang kurang mampu itu, mengilhami munculnya Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) yang dicetuskan oleh pemerintah Kota Palu. Program yang dilandasi kerjasama dalam kelompok itu, guna membantu warga miskin yang jumlahnya relatif cukup tinggi. Tujuannya adalah untuk memandirikan warga yang kurang mampu agar memiliki usaha atas dasar kemampuannya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Jika setiap orang sudah memiliki kemandirian, maka dengan sendirinya ia akan menularkan kemandirian itu kepada orang lain baik melalui penampilan dirinya maupun dengan mengajak orang lain untuk secara bersama (berkelompok) melakukan aktivitas usaha bersama. Usaha yang dijalankan atas dasar kebersamaan melalui kelompok, selain memungkinkan setiap orang termotivasi membangun semangat berusaha, aktivitas bersama dapat memberikan nilai tambah bagi setiap orang untuk saling berbagi pengalaman. Dengan berkelompok, dapat membangun kerjasama yang harmonis karena dilandasi oleh kepentingan dan tujuan yang sama.

Melalui kebersamaan dalam kelompok, setiap warga masyarakat yang memiliki usaha kecil dan kurang mampu, termotivasi mengelola usahanya dengan baik dan dengan demikian diharapkan secara bertahap masalah kemiskinan dapat teratasi. Kelompok masyarakat swadaya (KMS) sebagai wadah penggerak usaha masyarakat adalah suatu organisasi sosial kemasyarakatan yang dibentuk atas dasar kebutuhan untuk saling membantu dalam menggerakkan usaha, membangkitkan motivasi, menciptakan dan meningkatkan hubungan kerja, meningkatkan modal usaha, mendayagunakan potensi sosial ekonomi lokal, dan memperkuat budaya kewirausahaan, serta mengembangkan akses pasar. Agar tujuan yang diinginkan tercapai, maka kelompok usaha bersama tersebut disusun secara formal dengan struktur

organisasi yang sangat sederhana dalam bentuk kepengurusan terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.

Kepengurusan kelompok masyarakat swadaya (KMS) tersebut, memiliki pembagian tugas yang sangat sederhana, diuraikan secara jelas siapa mengerjakan apa, siapa yang berkewajiban dan bertanggungjawab apa. Setiap warga yang menjadi anggota kelompok, memiliki kewajiban yang sama dalam menjalankan usaha yaitu, selalu berkoordinasi dan melaporkan perkembangan usahanya. Hal terpenting dari adanya kelompok masyarakat tersebut, bagaimana agar anggota-anggotanya yang terdiri dari keluarga prasejahtera (miskin), dapat memperoleh manfaat penghasilan untuk meningkatkan pendapatan bagi kesejahteraan anggota keluarganya. Keberhasilan usaha masyarakat yang digerakkan oleh kelompok tersebut dapat dikategorikan ke dalam tiga tingkatan kemajuan yaitu, tumbuh, berkembang dan mandiri.

Usaha yang tumbuh, ciri-cirinya dapat dilihat antara lain dari: sudah ada pengadministrasian kegiatan, memiliki struktur organisasi, jangkauan pemasaran terbatas, asset terbatas, dan usaha yang dijalankan tidak pernah putus selama setahun. Usaha yang berkembang yaitu, yang sudah mengalami perkembangan di bidang sosial, ekonomi maupun kelembagaan meliputi peningkatan usaha ekonomi produktif, peningkatan pendapatan, anggota sudah mengalami pembagian keuntungan, jangkauan usaha berkembang atas dasar kemampuan dan peluang usaha, dengan bimbingan instansi teknis setempat, aparat desa dan pendamping. Ciri-cirinya dapat dilihat antara lain dari; administrasinya lengkap, organisasinya berkembang dengan baik, bertambahnya jangkauan pemasaran, berkembangnya akses pemasaran, dan berkembangnya asset.

Sedang usaha yang mandiri yaitu, yang sudah mengalami kemajuan di bidang sosial, ekonomi maupun kelembagaan dengan ciri-cirinya dapat dilihat antara lain dari: administrasi lengkap, organisasi sudah berkembang dengan baik, bertambahnya jangkauan pemasaran, berkembangnya asset, dapat mengakses lembaga keuangan komersial, membentuk lembaga keuangan mikro atau koperasi, dan memiliki sembilan kunci sukses usaha yaitu: a) usahanya berdasarkan rencana usaha dan anggaran belanja yang disepakati bersama, b) usahanya berorientasi pasar, c) menggunakan modal usaha sesuai dengan kebutuhan usaha, d) menggunakan bahan baku yang mudah diperoleh di lingkungan usaha, (5) melakukan usaha sesuai dengan keterampilan yang dimiliki, e) sistem pengelolaan usahanya dapat dilaksanakan oleh semua anggota, f) ada komitmen dan kerjasama yang kuat dari setiap anggota untuk

berhasil, g) harga yang ditawarkan menguntungkan dan bersaing di pasar, dan h) adanya kebersamaan dalam menghadapi berbagai hambatan usaha.

Usaha yang dikelola warga yang digerakkan oleh Kelompok Masyarakat Swadaya (KSM) di Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, sejak beroperasi pada tahun 2005 hingga saat ini belum mampu memandirikan usaha warga, bahkan belum termasuk dalam kategori usaha yang tumbuh. Hal itu dapat diamati antara lain, belum ada pengadministrasian usaha, dan usaha yang dijalankan tidak berkesinambungan. Walaupun sudah memiliki struktur organisasi, tetapi jarang melakukan koordinasi sebagai kewajiban anggota melaporkan perkembangan usaha yang dijalankan. Kepengurusannya pun belum berfungsi dengan baik terutama dalam melaksanakan pengendalian, monitoring, dan pelaporan perkembangan usaha. Usaha warga yang dominan menggeluti pembuatan kue (kering dan basah), dan usaha perbengkelan, hingga saat ini belum menampakkan perkembangan usaha yang menunjukkan adanya kemandirian. Dalam arti, Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) Kota Palu, belum berhasil (efektif) menanggulangi kemiskinan di Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **A. Konsep Kelompok Usaha Bersama**

Menurut Kast dan Rosenzweig (2002:3), "manusia itu bersifat sosial. Kecenderungan mengorganisir dan bekerja-sama dalam hubungan yang saling-bergantung merupakan hal yang inherent. Sejarah umat manusia dapat ditelusuri melalui perkembangan organisasi sosial". Sejak kehidupannya, manusia selalu menginginkan kebersamaan. Thoha (2008:2), mengemukakan pula bahwa "Ciri peradaban manusia yang bermasyarakat senantiasa ditandai dengan keterlibatannya dalam suatu organisasi tertentu".

Hidup bersama sudah menjadi suatu kebiasaan masyarakat terutama yang tinggal di wilayah perdesaan. Menurut Nawawi (2006:1) "manusia itu harus mewujudkan kehidupan bersama sesuai dengan tempat/wilayah domisili masing-masing. Keharusan itu bukan sekedar menifestasi hekitat kemanusiannya sebagai makhluk sosial, tetapi juga merupakan kebutuhan (*need*) untuk dapat hidup sebagai manusia".

Pemikiran itu pula yang mengilhami pembentukan organisasi sosial kemasyarakatan dalam usaha kelompok bersama sebagai media penanggulangan kemiskinan di desa. Hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam pembentukan suatu kelompok sebagai satu organisasi yaitu, adanya kebutuhan yang disepakati bersama. Beberapa orang yang menginginkan

sesuatu yang tidak dapat dipenuhi secara sendiri-sendiri dengan berkelompok keinginannya itu dapat terpenuhi. Menurut Wursanto (2005:16), "setelah rasa memiliki dari setiap anggota kelompok mulai tumbuh dan berkembang maka tumbuhlah suatu kesepakatan bersama dari para anggota kelompok yang harus ditaati oleh setiap anggota". Kesepakatan tersebut menurut Wursanto (2005:16) antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Kesepakatan bersama terhadap tujuan yang akan dicapai.
- 2) Kesepakatan bersama dalam hal menetapkan berbagai jenis kegiatan yang harus dilakukan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 3) Kesepakatan bersama dalam hal menetapkan ketentuan-ketentuan atau norma-norma yang harus ditaati oleh setiap anggota kelompok. Aturan-aturan tersebut dapat bersifat tertulis maupun tidak tertulis.
- 4) Kesepakatan bersama dalam hal menetapkan berbagai sarana yang diperlukan dalam usaha mencapai tujuan tersebut.
- 5) Kesepakatan bersama dari para anggota dalam hal menetapkan cara atau metode yang paling baik untuk mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan pandangan tersebut dapat dipahami, suatu organisasi terbentuk karena adanya kesepakatan bersama sehingga memunculkan rasa memiliki di antara anggota. Dalam arti bahwa, jika membentuk suatu organisasi, hal yang perlu diperhatikan adalah keinginan bersama untuk mencapai suatu tujuan yang disepakati bersama. Atas dasar kesepakatan itulah yang mendasari terbentuknya organisasi sehingga dalam perjalanannya tidak mengalami hambatan yang berarti. Menurut Herbert G.Hicks (dalam Winardi,2003:8), terdapat berbagai tipe organisasi, ada organisasi yang disebut sebagai berikut: "Katanya,.....organisasi-organisasi bersifat sangat variabel". Sesuatu organisasi dapat menjadi fokus sentral kehidupan seseorang, atau ia mungkin hanya merupakan perannya untuk sementara waktu. Sebuah organisasi mungkin dapat bersifat kaku, "dingin", tanpa kepribadian, atau ia kadang-kadang dapat menghasilkan hubungan-hubungan luwes dan bermakna bagi para anggotanya".

## **B. Konsep Efektivitas**

Usaha bersama yang dikelola melalui kelompok yang terorganisir dalam suatu struktur, baik yang berorientasi pada kepentingan bersama maupun kepentingan golongan, keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran dinyatakan "efektif". Menurut Thoha (2008:3), "suatu kegiatan organisasi yang efektif jika di dalamnya terdapat interaksi tiga dimensi yaitu: dimensi teknis, dimensi konsep, dan dimensi manusia". Organisasi tidak sekedar berarti wadah

sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan, akan tetapi juga merupakan mekanisme yang berlangsung dalam proses kerja sama itu. Oleh karena itu maka organisasi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Organisasi yang berhasil bagi pencapaian tujuan apabila ternyata memungkinkan terwujudnya kerja sama yang efektif dalam melaksanakan volume dan beban kerja organisasi tersebut.

Dalam buku "*Modern Organizations*" yang diterjemahkan oleh Suryatim karangan Etzioni (1995:12), dikemukakan bahwa "organisasi dibentuk agar dapat menjadi unit sosial yang paling efektif dan efisien. Efektivitas organisasi diukur dari tingkat sejauh mana ia berhasil mencapai tujuannya, sedangkan efisiensi organisasi dikaji dari segi jumlah sumber daya yang dipergunakan untuk menghasilkan suatu unit masukan (*unit of output*). Biasanya masukan berkaitan erat, tetapi tidak sama dengan tujuan organisasi".

Dalam Ensiklopedi Umum Administrasi (1999:109), disebutkan bahwa "efektivitas, kata kerja efektif berarti terjadinya suatu akibat atau efek yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang dapat terjangkau secara efisien tentu saja pekerjaan itu berarti efektif dilihat dari sisi hasil, tujuan atau akibat yang dikehendaki dengan berbuat itu telah tercapai, bahkan secara maksimal (baik mutu maupun jumlahnya) sebaliknya dilihat dari segi usaha efek yang diharapkan juga telah berhasil dicapai bahkan dengan usaha-usaha yang maksimal. Setiap pekerjaan yang efektif belum tentu efisien, karena hasil mungkin dicapai dengan penghamburan material, juga berupa pikiran, tenaga, waktu maupun benda lainnya"

Menurut Emerson (dalam Handayani, 1990:16) "*effectiveness is a measuring in term attaining prescribed goals or objective*" (efektivitas adalah pengukuran dalam arti pencapaian sasaran atau tujuan yang ditentukan sebelumnya). Jadi efektivitas adalah suatu kegiatan diukur dari besar kecilnya persesuaian antara tujuan yang harus dicapai dengan hasilnya". Cahyono (2003:54), mengartikan "efektivitas adalah kemampuan dari setiap perangkat kerja manusia maupun bukan manusia dapat melahirkan suatu hasil yang maksimal yang digunakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan". Dalam pengertian tersebut, efektivitas berarti keberhasilan organisasi dalam upaya untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan rencana. Demikian pula menurut Widjaja (2004:69), memberi pengertian bahwa "efektivitas adalah ukuran suatu organisasi dimana kemampuan organisasi untuk mencapai segala keperluannya. Ini berarti organisasi mampu menyusun dan mengorganisasikan sumber daya untuk mencapai tujuan".

Berdasarkan beberapa pandangan tersebut di atas, secara umum berarti efektivitas menunjuk pada hasil yang dicapai atau dilihat dari pencapaian tujuan. Keberhasilan organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanismenya mempertahankan diri dan mengejar sasarnya. Dengan kata lain penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sarana maupun tujuan-tujuan organisasi sebagaimana ditekankan Barnard (dalam Gibson,1997:11), bahwa “efektivitas adalah pencapaian sasaran yang telah dispekati atau usaha bersama. Tingkat pencapaian sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas”.

Suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut berhasil dilaksanakan dengan baik. Bila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya dapat disebut efektif. Efektivitas organisasi usaha dalam kelompok dapat dilihat dari pencapaian tujuan yang dikehendaki bersama. Orientasi pencapaian tujuan sebagai ukuran bagi keberhasilan organisasi, karena pada dasarnya organisasi dibentuk untuk melaksanakan sesuatu dan organisasi bergerak melaksanakan fungsinya kearah sesuatu tujuan. Dalam pedoman pembentukan kelompok usaha bersama untuk mendapatkan modal usaha dalam rangka menanggulangi kemsikinan, yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia (2010), diharapkan dapat (a) Memotivasi keluarga fakir miskin agar mampu meningkatkan pendapatannya; (b) Meningkatkan interaksi dan kerjasama dalam kelompok; (c) Mendayagunakan potensi dan sumber sosial ekonomi lokal; (d) Memperkuat budaya kewirausahaan; dan (e) Mengembangkan akses pasar dan menjalin kemitraan sosial ekonomi dengan berbagai pihak yang terkait.

## **METODE PENELITIAN**

Sasaran penelitian ini adalah warga prasejahtera di Kelurahan Mamboro yang dikoordinasikan oleh Kelompok Masyarakat Swadaya (KMS) yang memperoleh bantuan modal usaha dari Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) Kota Palu. Usaha warga yang dikoordinasikan oleh KMS itu telah berlangsung sejak tahun 2005.

Melalui teknik penyebaran kuesioner dalam bentuk daftar pertanyaan, data primer diperoleh dari responden penelitian berjumlah 20 (dua puluh) orang sebagai anggota kelompok dengan berbagai jenis usaha pengolahan kue kering dan kue basah, serta perbengkelan. Selain itu dilakukan telaah dokumen sebagai upaya memperoleh data pendukung yang berkaitan dengan permasalahan program Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) Kota Palu. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan tabel frekuensi dan persentase.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Memberikan Motivasi**

Berdasarkan hasil rekapitulasi skor analisis tabel tersebut di atas, diketahui bahwa penanggulangan kemiskinan melalui Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM), kurang berhasil (efektif) meningkatkan pendapatan warga yang memiliki usaha bersama di Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu. Hasil analisis tabel tentang pemberian modal usaha untuk dapat memberikan motivasi kepada warga yang tergabung dalam kelompok usaha bersama memperoleh skor rata-rata 1,5 dalam kategori sedang. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa bantuan modal berasal dari Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) Kota Palu, kurang efektif dapat memberikan dorongan atau semangat kepada warga yang tergabung dalam kelompok usaha bersama untuk meningkatkan pendapatannya. Berdasarkan persentase jawaban, terdapat 25 persen responden menjawab selalu bersemangat, sebagian besar atau 50 persen responden menjawab kadang-kadang bersemangat, dan 25 persen responden yang menjawab tidak pernah termotivasi dalam meningkatkan pendapatannya.

### **2. Berinteraksi dan Bekerjasama**

Hasil analisis pada tabel 3 tersebut menunjukkan skor 1,6 kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan modal berasal dari Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) Kota Palu, kurang efektif dapat memberikan kesempatan kepada warga yang tergabung dalam kelompok usaha bersama untuk berinteraksi (berhubungan) dengan warga lainnya guna bekerjasama meningkatkan pendapatannya.

Persentase jawaban responden menunjukkan, 10 persen responden menjawab selalu berinteraksi dan bekerjasama, 40 persen responden menjawab kadang-kadang berinteraksi dan bekerjasama, dan sebagian besar atau 50 persen responden yang menjawab tidak pernah berinteraksi dan bekerjasama guna meningkatkan pendapatannya.

### **3. Mendayagunakan Potensi Sosial Ekonomi Lokal**

Skor yang diperoleh dari indikator 2,6 kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan modal berasal dari Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) Kota Palu, efektif dapat mendayagunakan potensi sosial ekonomi lokal. Persentase jawaban responden menunjukkan, sebagian besar atau 60 persen responden menjawab selalu mendayagunakan potensi sosial ekonomi lokal, 40 persen responden menjawab kadang-kadang

mendayagunakan potensi sosial ekonomi lokal, dan tidak ada responden yang menjawab tidak pernah mendayagunakan potensi sosial ekonomi lokal.

#### **4. Memperkuat Budaya Kewirausahaan**

Hasil analisis pada tabel 5 tersebut menunjukkan skor 2 kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan modal berasal dari Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) Kota Palu, efektif dapat memperkuat budaya dan kewirausahaan dalam mengelola usahanya agar berkembang dengan baik.

Persentase jawaban responden menunjukkan, 20 responden menjawab selalu berusaha meningkatkan pengetahuan dan kebiasaan dalam mengelola usaha agar berkembang dengan baik, sebagian besar atau 60 persen responden menjawab kadang-kadang berusaha meningkatkan pengetahuan dan kebiasaan dalam mengelola usaha agar berkembang dengan baik, dan 20 persen responden yang menjawab tidak pernah berusaha meningkatkan pengetahuan dan kebiasaan dalam mengelola usaha agar berkembang dengan baik.

#### **5. Dapat Mengembangkan Akses Pasar**

Hasil analisis pada tabel 6 tersebut menunjukkan skor 1,3 kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan modal berasal dari Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) Kota Palu, tidak efektif dapat mengembangkan akses pasar.

Persentase jawaban responden menunjukkan, tidak ada responden menjawab selalu menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai lembaga sosial dan ekonomi untuk meningkatkan usaha, 40 persen responden menjawab kadang-kadang menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai lembaga sosial dan ekonomi untuk meningkatkan usaha, dan sebagian besar atau 60 persen responden yang menjawab tidak pernah menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai lembaga sosial dan ekonomi untuk meningkatkan usaha

Berarti, belum efektif meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat yang memiliki usaha kecil menengah. Hasil pengamatan selama ini, kurang berhasilnya Pemerintah Kota Palu membantu masyarakat miskin meningkatkan pendapatan melalui usaha bersama, disebabkan kurangnya pembinaan, bimbingan dan pengawasan, dan terutama minimnya modal yang diperoleh dari Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM), sehingga warga kurang memanfaatkan dengan baik modal usaha tersebut untuk memberikan motivasi atau dorongan dan semangat, meningkatkan interaksi

dan kerjasama, dan memperkuat budaya kewirausahaan serta mengembangkan akses pasar.

Bantuan modal usaha yang diberikan oleh Pemerintah Kota Palu kepada usaha kelompok bersama masyarakat miskin, tidak diikuti dengan pembinaan secara berkelanjutan. Pembinaan dan bimbingan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Palu melalui dinas teknis dalam hal ini Dinas Koperasi, perdagangan, perindustrian dan lembaga perbankan. Kewajiban instansi teknis tersebut, selain sebagai fasilitator, juga sebagai mediator antar instansi terkait lainnya dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah sesuai dengan harapan masyarakat. Usaha kelompok setelah memperoleh bantuan modal, tidak diikuti dengan pengawasan, pembinaan maupun bimbingan. Warga hanya pada saat menerima bantuan modal bersemangat mengelola usahanya, tanpa mengalami perkembangan dan peningkatan pendapatan.

Dalam dokumen strategi nasional penanggulangan kemiskinan, rencana aksi penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin laki-laki dan perempuan, menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat. Rencana aksi tersebut antara lain dengan memberikan bantuan modal usaha kepada seluruh warga masyarakat miskin melalui kelompok usaha bersama. Dengan berkembangnya usaha tersebut, sudah tentu berakibat pada peningkatan pendapatan dan pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan dan terutama menjadi mandiri dalam mengelola usahanya.

Pada dasarnya program Pemerintah untuk memberikan bantuan modal usaha dimaksudkan agar warga masyarakat miskin yang memiliki usaha kecil dapat bersatu membentuk kelompok sehingga dapat bekerjasama mengelola usaha. Dengan demikian, kerjasama tersebut dapat melahirkan bukan hanya motivasi semangat dalam berusaha, tetapi juga akses memperoleh bantuan akan lebih mudah. Demikian pula akses pasar akan menjadi lebih luas sehingga dengan demikian, usahanya akan berkembang dengan baik. Kelompok usaha bersama di Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, terkesan sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan modal. Sementara, keinginan untuk meningkatkan usaha, belum nampak karena selain tidak adanya pembinaan, bimbingan dan pengawasan, sehingga pemberian bantuan modal tersebut menjadi sia-sia. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) Kota Palu belum efektif meningkatkan pendapatan warga di Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara.

Kemandirian warga dalam meningkatkan dan mengembangkan usahanya, merupakan ukuran keberhasilan.

## **KESIMPULAN**

Hasil analisis tabel indikator motivasi usaha memperoleh skor 1,5 kategori sedang, yang menunjukkan bahwa bantuan modal usaha yang diperoleh dari program tersebut, kurang efektif memberikan dorongan atau semangat berusaha untuk meningkatkan pendapatan. Analisis tabel indikator berinteraksi dan bekerjasama memperoleh skor 1,6 kategori sedang, menunjukkan bahwa bantuan modal usaha yang diperoleh dari program tersebut, kurang efektif memberikan kesempatan kepada warga yang tergabung dalam kelompok usaha bersama untuk berinteraksi (berhubungan) dengan warga lainnya guna bekerjasama meningkatkan pendapatannya. Analisis tabel indikator pendayagunaan potensi sosial ekonomi lokal, memperoleh skor 2,6 kategori tinggi, menunjukkan bantuan modal usaha yang diperoleh dari program tersebut, efektif dapat mendayagunakan potensi sosial ekonomi lokal.

Analisis tabel indikator memperkuat budaya kewirausahaan memperoleh skor 2 kategori tinggi, menunjukkan bahwa bantuan modal kurang efektif dapat memperkuat budaya dan kewirausahaan dalam mengelola usahanya agar berkembang dengan baik. Analisis tabel indikator mengembangkan akses pasar, memperoleh skor 1,3 kategori rendah, menunjukkan bahwa bantuan modal yang diperoleh dari program tidak efektif dapat mengembangkan akses pasar.

## **REKOMENDASI**

Untuk meningkatkan pendapatan kelompok usaha bersama dalam rangka menanggulangi kemiskinan di masa mendatang, masih membutuhkan perhatian yang lebih intensif dari instansi teknis Kota Palu melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan agar warga yang memiliki usaha lebih termotivasi dalam mengelola usahanya, dapat berinteraksi dan bekerjasama dengan lembaga dan usaha lainnya, dapat memperkuat budaya kewirausahaan, dan dapat mengembangkan akses pasar.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Cahyono, Bambang, 2003. *Manajemen Industri Kecil*, Yogyakarta : Liberty
- Etzioni, Amitai, 1995, “*Modern Organizations*,” *Organisasi-Organisasi Modern*, terjemahan Suryatim, Cetakan Kedua, Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press)
- Handyaningrat, Soewarno, 1990, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, cet. kesepuluh, Jakarta: CV.Haji Masagung
- Kast, Fremont E., Rosenzweig, Jamse F., 2002, *Organisasi & Manajemen*, terjemahan Hasyim Ali, Edisi Revisi, Cet. Kelima, Jakarta : Bumi Aksara
- Kementerian Sosial RI., 2010, *Pedoman Kelompok Usaha Bersama*, Jakarta : Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin
- Nawawi, Hadari, dan M. Martini., 2006, *Kepemimpinan Yang Efektif*, Cetakan kelima, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Thoha, Miftah., 2008, *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Widjaja. H.A.W., 2004, *Otonomi Desa*, Cet. Kedua, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Winardi, J. 2000, *Kepemimpinan dalam Manajemen*, edisi baru, Jakarta : Rineke Cipta
- Wursanto, Ignatius, 2005, *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*, Edisi II, cetakan kedua, Yogyakarta : Andi Offset